



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	1
C Isu-isu Strategis	2
D Struktur Organisasi	4
E Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran	4
F Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	7
G Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	11
B Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	13
C Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
D Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi	16
B Realisasi Anggaran	21
C Inovasi	26
D Penghargaan	27
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	29
B Rekomendasi	29
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	Lamp.
RKT dll	Lamp.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : Perjanjian	17
Tabel : Capaian Kinerja	19
Tabel : Realisasi Capaian Tahun 2024	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar	:	Struktur Dinas	Lamp.
Gambar	:	<i>Cascading</i> Kinerja	Lamp.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik, dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Kendal, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810522 200501 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik, dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Kendal, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal



ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19810522.200501 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi

Gaya perubahan mendasar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dilakukan inisiasi melalui reformasi birokrasi yang dijadikan sebagai tonggak bagi pemerintahan untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Sasaran reformasi birokrasi diantaranya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dimana sasaran-sasaran pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap hingga diharapkan menghasilkan *governance* yang berkualitas.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan bersifat radikal dan revolusioner. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan reformasi birokrasi diharapkan menjadi pendukung utama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu meleyani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi delapan aspek manajemen pemerintahan, yang salah satunya adalah tata laksana yang di dalamnya meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dukungan terhadap proses pencapaian prinsip-prinsip *good governance* adalah dengan membangun sebuah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam sebuah peta proses bisnis hubungan mandat kinerja. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi perangkat daerah.

Sumber daya manusia dan penilaian kinerja untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintahan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

C. Isu-isu Strategis

Dari hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka

dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

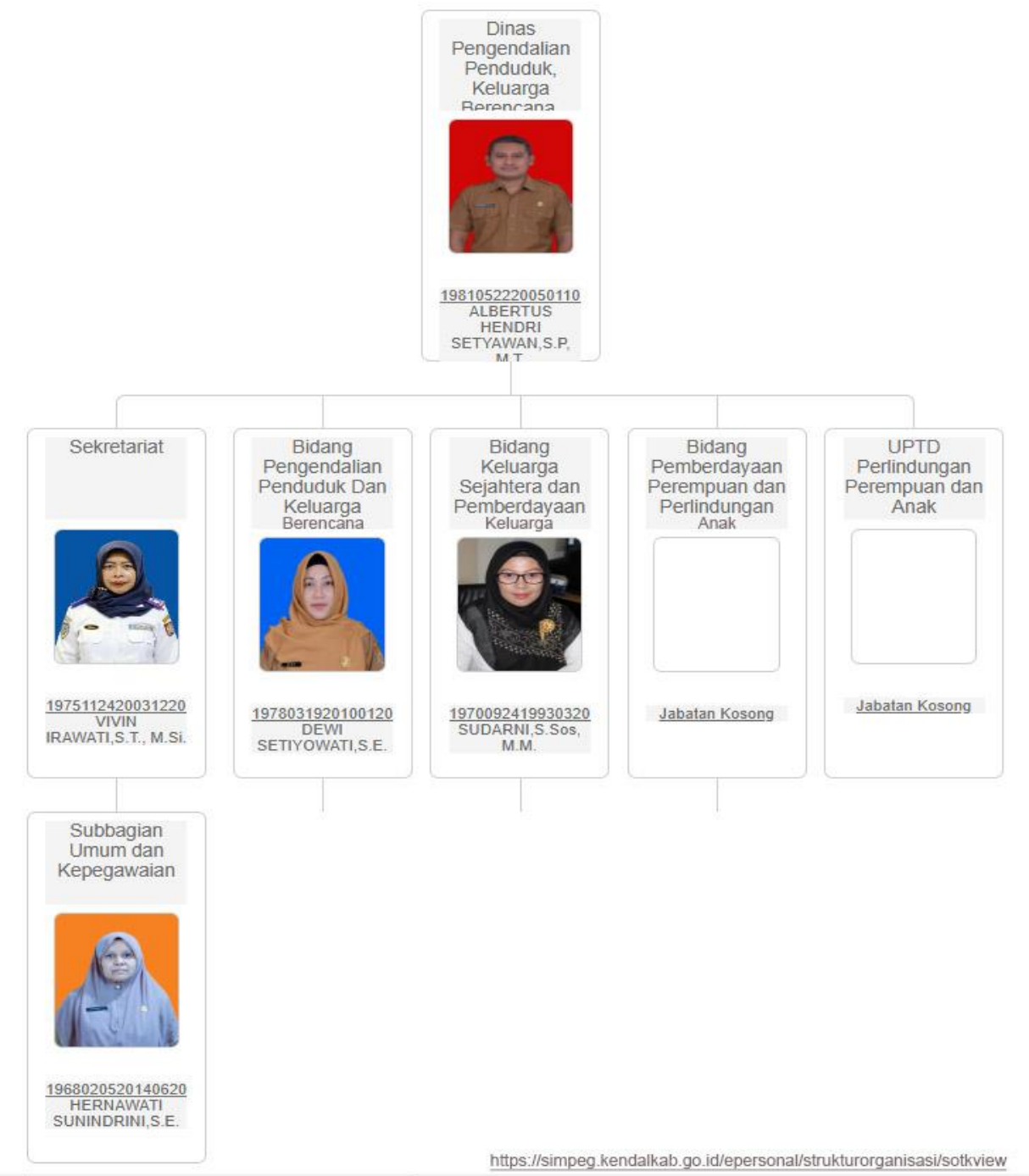
Isu – Isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

No.	Isu – Isu Strategis	Bidang Urusan
1	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 dengan rasio sebesar 4,9 per 100.000 penduduk perempuan dan masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2024 sebesar 0,02 %.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari cakupan Industri Rumahana (IR) yang mendapat pelatihan baru mencapai 29,75% dari keseluruhan pelaku IR yang ada.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber-KB dan kurangnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB (2,17%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB), tahun 2024 sebesar 87,76 %.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), hingga tahun 2024 baru 10 Sekolah yang sudah mengintegrasikan SSK dalam kurikulum mata pelajaran.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting. Angka keluarga beresiko stunting adalah 13,5%.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal maka dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal



E. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebanyak 100 orang yang terdiri atas:

- | | |
|--|------------|
| 1. Kepala Dinas | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris | : 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang | : 2 Orang |
| 4. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian | : 1 Orang |
| 5. Sub Koordinator | : 5 Orang |
| 6. Pelaksana | : 9 Orang |
| 7. Penyuluh KB | : 37 Orang |
| 8. Tenaga Penunjang Kegiatan | : 12 Orang |
| 9. Tenaga Kebersihan | : 3 Orang |
| 10. Pramusaji (di Balai Penyuluhan KB) | : 19 Orang |
| 11. Penjaga Malam (di Balai Penyuluhan KB) | : 11 Orang |

b. Sarana Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai sarana prasarana yang terdiri atas:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	TANAH	3	Lokasi	
2	PERALATAN DAN MESIN	2181		
	1. Alat Angkutan			
	– Mitsubishi L300	1	Unit	Baik
	– Mitsubishi Strada	1	Unit	Baik
	– Toyota Avansa	1	Unit	Kurang Baik
	– Toyota Kijang Innova	2	Unit	Baik
	– Hiace Mobil Angkutan Akseptor KB	1	Unit	Baik
	2. Sepeda Motor Honda Supra 125	44	Unit	Kurang Baik
	3. Sepeda Motor Yamaha Jupiter	41	Unit	Baik
	4. Handphone Samsung Tab S2	55	Buah	Kurang Baik
	5. Alat Kedokteran	695	Buah	Baik
	6. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	1321	Buah	Baik
	7. Peralatan Studio	19	Buah	Kurang Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	40		
	1. Mushola	1	Gedung	Baik
	2. Perkerasan Halaman Kantor	1	Bangunan	Baik
	3. Pagar	5	Bangunan	Baik
	4. Gedung Balai Penyuluhan KB	20	Gedung	Baik
	5. Gedung Alat dan Obat Kontrasepsi (Gudang)	1	Gedung	Baik
	6. Baliho	7	Bangunan	Baik
	7. Garasi Mobil	1	Bangunan	Baik
	8. Garasi Motor	1	Bangunan	Baik
	9. Tempat Parkir Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kendal	1	Bangunan	Baik
	10. Kanopi Parkir Balai Penyuluhan KB Kecamatan Limbangan	1	Bangunan	Baik
	11. Paving Balai Penyuluhan KB Kecamatan Limbangan	1	Bangunan	Baik

4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	7		
	1. Intalasi Listrik	1	Instalasi	Baik
	2. Jaringan Telepon	1	Instalasi	Baik
	3. Jalan Khusus Komplek	4	Buah	Baik
	4. Bangunan Pembuang Air (Saluran Pembuang)	1	Bangunan	Baik

c. Anggaran

Anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah Rp 22.429.270.654 dengan rincian program aggaran sebagai berikut:

Tabel 1.3
 Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Kode rek.	Uraian program	Anggaran
36930	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.718.012.236
37295	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	399.991.702
37660	Program Perlindungan Perempuan	167.836.000
38025	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	76.625.000
38391	program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	180.000.000
38756	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	393.124.000
39121	Program Perlindungan Khusus Anak	204.239.000
37301	Program Pengendalian Penduduk	497.550.000
37666	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.416.234.216
38031	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.375.658.500
JUMLAH TOTAL		22.429.270.654

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagai berikut:

Tabel 1.4
 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
1	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id dengan tepat waktu; Mempublikasikan dokumen perencanaan

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
	dengan tepat waktu;	kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah dan https://esr.menpan.go.id tepat waktu Telah mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website pada website resmi Pemerintah Daerah, sebagaimana terlampir.
2	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>cascading</i> yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan atau target indikator kinerja utama secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan target dan tanggung jawab dari setiap jabatan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>cascading</i> yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan atau target indikator kinerja utama secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan target dan tanggung jawab dari setiap jabatan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; Telah melaksanakan reviu dan penyusunan <i>cascading</i> yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan atau target indikator kinerja utama secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan target dan tanggung jawab dari setiap jabatan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir
3	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan <i>outcome</i> yang diinginkan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan <i>outcome</i> yang diinginkan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yang perlu diperhatikan paling tidak, meliputi: • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan komponen perencanaan; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan hierarki organisasi;

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
	strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yang perlu diperhatikan paling tidak, meliputi: • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan komponen perencanaan; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan hierarki organisasi; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting struktur organisasi; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting program/kegiatan; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan nomenklatur program/kegiatan; dan • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting anggaran. (Sebagaimana tersebut dalam Bab III pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah);	• Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting struktur organisasi; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting program/kegiatan; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan nomenklatur program/kegiatan; dan; • Tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan eksisting anggaran. (Sebagaimana tersebut dalam Bab III pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah) Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan <i>outcome</i> yang diinginkan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.
4	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. <i>Crosscutting</i> merupakan identifikasi kemungkinan adanya <i>outcome</i> antara yang menjadi kinerja organisasi lain. Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak hanya selalu hanya	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. <i>Crosscutting</i> merupakan identifikasi kemungkinan adanya <i>outcome</i> antara yang menjadi kinerja organisasi lain. Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak hanya selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani <i>outcome</i> atau kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian <i>outcome</i> final. Jika hal ini ditemukan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
	terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani <i>outcome</i> atau kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian <i>outcome</i> final. Jika hal ini ditemukan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari pohon kinerjanya. Namun demikian perlu mengidentifikasi dan menandai kondisi tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut;	antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari pohon kinerjanya. Namun demikian perlu mengidentifikasi dan menandai kondisi tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut; Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. <i>Crosscutting</i> merupakan identifikasi kemungkinan adanya <i>outcome</i> antara yang menjadi kinerja organisasi lain. Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak hanya selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani <i>outcome</i> atau kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian <i>outcome</i> final. Telah Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir.
5	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan; melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan, dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah di tetapkan; Telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian internal beserta dokumentasinya, sebagaimana terlampir.
6	Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga tercermin Target indikator yang akan dicapai;	Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga tercermin Target indikator yang akan dicapai; Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
		tercermin Target indikator yang akan dicapai dan telah menetapkan IKU menggunakan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai Permen PAN RB Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 yang telah dituangkan pada SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Nomor: 565/1274/2021, tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, sebagaimana terlampir.
7	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala; dan	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala; DP2KBP2PA telah melaksanakan update dan input capaian kinerja secara berkala melalui SIEVA (Sistem Evaluasi Kinerja) setiap triwulan, sebagaimana terlampir dengan alamat: https://sieva-kendal.simda.net
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui <i>online/ zoom meeting</i> maupun <i>class meeting</i> untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui <i>online/zoom meeting</i> maupun <i>class meeting</i> untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan. Telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui <i>online/zoom meeting</i> maupun <i>class meeting</i> untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan melalui SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), dengan alamat: https://simpeg.kendalkab.go.id , sebagaimana terlampir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah

10

sebagai berikut:

DAFTAR ISI

Memuat Halaman Judul

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, Struktur Organisasi, Dukungan SDM, Sarana Prasanana, Anggaran, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023, dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Inovasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

1. Visi

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1) Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2) Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3) Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4) Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.:

- 1) Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri

Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. Industri, yaitu dengan
 - 1) Penyebaran dan pemerataan industry;
 - 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
 - 3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri;
 - 4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.
 - b. Pariwisata, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - 4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.
 - c. UMKM, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
 - 2) Inkubasi usaha;
 - 3) Peningkatan daya saing UMKM.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. SDM Unggul
 - 1) Membangun peran lebih pendidikan untuk mendorong wajib belajar 12 tahun;
 - 2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
 - 3) Membangun ruang belajar informal dimasyarakat; dan
 - 4) Mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
- b. Daya Saing
 - 1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM Berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.

c. Revolusi Industri 4.0

- 1) Peningkatan penguasaan teknologi;
- 2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran online.

- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan

Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beagama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

a. Inklusif

- 1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis;
- 2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.

b. Makmur/Kesejahteraan

- 1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal;
- 2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.

c. Kelembagaan

- 1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama;
- 2) Mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam pembangunan Kabupaten Kendal.

- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan

- 1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
- 2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi channel;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur.

- b. Berkelanjutan
 - 1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - 2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakatan secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. *e-Government*

- 1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
- 2) Mendorong optimalisasi *e-Planning*, *e-Monitoring*, *e-Musrenbang*, *e-Services*, *e-Budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b. Partisipatif

Mendorong pendekatan pembangunan konsep bottom-up dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c. *Good Governance*

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsensus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran		Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Kondisi awal	Target Kinerja/ Sasaran Tahun Ke-						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan 16 kesehatan 16 gender	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85	92,95	93,05	93,10	93,20	93,30	93,40	
2	Peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan orang	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	
3	Peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak (KLA) dan perlindungan anak khusus	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,96	20	20	20	20	20	20	
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	1. Meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS 2. Peningkatan Layanan Kesertaan Ber-KB bagi PUS	4	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	
			5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	65	69	69	70	70	71	71	
			6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,77	15	14	13	12	11	10	

B Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Strategi dan arah kebijakan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan kedepan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	Peningkatan kesertaan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan Anak khusus	Memberikan memenuhi dan menjalin pelayanan dasar 17 esehatan 17 dan 17 esehatan sertamampu meningkatkan dan kesejahteraan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.		
3	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak (KLA) dan perlindungan anak khusus		
4	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	Peningkatan kualitas 17esehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	
5	Peningkatan Layanan Kesertaan Ber-KB bagi PUS		

C Perjanjian Kinerja pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Formula)	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,85	93,05	93,10	93,20	93,30	93,40
2. Meningkatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100
3. Meningkatkan penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Perlindungan Anak Khusus	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan Indeks	20	20	20	20	20	20
4. Meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	4. TFR (Total Fertility Rate)	%	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
5. Peningkatan Layanan Kesertaan Ber-KB bagi PUS	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	%	69	69	70	70	71	71
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,77	14	13	12	11	10

NO	Program	Aanggaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	399.991.702	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4
2	Perlindungan Perempuan	167.836.000	2. Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	76.625.000	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	20	20	20	20	20
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	180.000.000	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
5	Pemenuhan Hak Anak	393.124.000	5. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	69	69	70	70	71	71
6	Perlindungan Khusus Anak	204.239.000	6. Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15	14	13	12	11	10
7	Pengendalian Penduduk	205.950.000							
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.416.234.216							
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.375.658.500							
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.718.012.236							
		22.429.270.654							

D Instrumen pendukung Capaian Kinerja pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System (GRMS) Kabupaten Kendal, GRMS adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah Kabupaten Kendal. Sistem aplikasi yang terdiri atas Sistem Informasi Perangkat Daerah RI (SIPD RI), Sistem Informasi Perangkat Daerah Kemendagri (SIPD Kemendagri) , Sistem Informasi Pengendalian Operasional (SIMPOK), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), Monitoring dan evaluasi (e-monev), Renja PD, dan Renstra PD pun mulai diterapkan di Kabupaten Kendal. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal terpilih. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian kerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 ada 3 (tiga) aspek yang akan di bahas, yaitu :

- 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- 2. Akuntabilitas Keuangan
- 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

A Capaian Kinerja Organisasi

Skala nilai peringkat Kinerja sebagai berikut:

- a. Sangat baik : > 100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 - 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

Capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Persentase	
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	94,29	101	93,40
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	4,9	408	20
	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Indeks	2,2	2,03	108	2,2
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	70	70,52	101	71
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui						

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Persentase	
pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12	7,22	166	10

Menyajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	94,29	101	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	RPJMD dan sieva
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	4,9	408	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,2	2,03	108	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	70	70,52	101	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	12	7,22	166	Sangat Baik	RPJMD dan sieva

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)

Tujuan	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		target	Realisasi	Capaian %	target	Realisasi	Capaian %	target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,95	93,03	100	93,05	93,79	101	93,1	93,79	101
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	7,27	275	20	10,42	192	20	8,03	249
	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,3	2,2	105	2,3	2,14	107	2,3	1,9997	115
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	69	56,66	82	69	66,19	96	70	68,9	98
2. Meningkatnya kualitas Kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15	20	75	14	17,44	80	13	12,27	106

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tujuan	No.	Indikator Kinerja	Capaian 2024 (%)	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101	93,40	Sangat Baik
	2.	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	Baik
	3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000)	408	20	Sangat Baik
	4.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	108	2,2	Sangat Baik
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	5.	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	101	71	Sangat Baik
	6.	Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	166	10	Sangat Baik

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tujuan/ Sasaran	No.	IndikatorKinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Capaian %
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,29	91,85	102,66
	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	Tidak ada	Tidak ada
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,9	Tidak ada	Tidak ada
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	4	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,03	2,11	103,94
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	70,52	61,71	114,27
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7,22	11,11	153,88

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tujuan	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 %	Analisis Keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	94,29	101	Sangat Baik	Upaya untuk meningkatkan perlu koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait
	2	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	4,9	408	Sangat Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	4	TFR (Total Fertility Rate)	2,2	2,03	108	Sangat Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	70	70,52	101	Sangat Baik	Memberikan Advokasi dan KIE kepada PUS untuk beralih menggunakan alat kontrasepsi modern
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12	7,22	166	Sangat Baik	Memberikan Avokasi dan KIE pada masyarakat melalui berbagai Media untuk ber-KB

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	94,29	101	Sangat Baik	1.814.939.702	1.492.679.535	82,24	17,76
	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	Baik				
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	4,9	408	Sangat Baik				
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	%	2,2	2,03	108	Sangat Baik	16.289.442.716	15.943.172.914	97,87	2,13
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	70	70,52	101	Sangat Baik				
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12	7,22	166	Sangat Baik				

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian 2024	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2024	Menunjang/Tidak Menunjang
1. Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak khusus	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang mengimplementasikan PUG	100	Menunjang
			PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	102	Menunjang
			PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data pilah Gender	102	Menunjang
			PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase kecamatan layak anak	100	Menunjang
	Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan pada anak yang ditangani	100	Menunjang
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	408	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	408	Menunjang
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	108	PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan usia pernikahan dini	108	Menunjang
	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	101	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	101	Menunjang
	Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	166	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	166	Menunjang

B Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Laporan Realisasi Keuangan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal
S.d. Desember 2024

Kode Rekening	Uraian Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember 2024	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK		22.429.270.654	21.602.971.370	826.299.284	96,32
36930	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.718.012.236	4.494.522.921	223.489.315	95,26
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	7.719.600	7.280.400	51,46
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.800.000	5.229.900	5.570.100	48,43
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000	2.489.700	1.710.300	59,28
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.186.340.036	3.016.038.064	170.301.972	94,66
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.186.340.036	3.016.038.064	170.301.972	94,66
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	587.672.200	567.492.076	20.180.124	96,57
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.500.000	52.274.000	226.000	99,57
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.670.000	16.640.550	29.450	99,82
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.449.200	10.448.450	750	99,99
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.229.000	478.906.576	19.322.424	96,12
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.824.000	9.222.500	601.500	93,88
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.989.000	11.000	99,89
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.989.000	11.000	99,89
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.000.000	703.593.498	18.406.502	97,45

2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	100,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	147.664.477	12.335.523	92,29
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	74.869.200	130.800	99,83
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.000.000	476.059.821	5.940.179	98,77
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.000.000	189.690.683	7.309.317	96,29
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.000.000	84.843.083	4.156.917	95,33
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	8.000.000	0	100,00
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	96.847.600	3.152.400	96,85
37295	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	399.991.702	321.748.285	78.243.417	80,44
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.750.000	73.279.400	6.470.600	91,89
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	41.800.000	39.060.000	2.740.000	93,44
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	37.950.000	34.219.400	3.730.600	90,17
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.070.000	15.477.750	2.592.250	85,65
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	18.070.000	15.477.750	2.592.250	85,65
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	302.171.702	232.991.135	69.180.567	77,11
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.171.702	95.745.936	42.425.766	69,29
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	62.025.000	17.975.000	77,53
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	84.000.000	75.220.199	8.779.801	89,55
37660	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	167.836.000	131.016.100	36.819.900	78,06
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.900.000	21.420.100	6.479.900	76,77
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.900.000	21.420.100	6.479.900	76,77
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	139.936.000	109.596.000	30.340.000	78,32
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.936.000	39.860.000	20.076.000	66,50
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	69.736.000	10.264.000	87,17

38025	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	76.625.000	70.137.150	6.487.850	91,53
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.625.000	70.137.150	6.487.850	91,53
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	46.566.500	3.433.500	93,13
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.625.000	23.570.650	3.054.350	88,53
38391	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	180.000.000	161.460.000	18.540.000	89,70
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	161.460.000	18.540.000	89,70
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000	161.460.000	18.540.000	89,70
38756	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	393.124.000	327.404.000	65.720.000	83,28
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota	378.180.000	313.799.000	64.381.000	82,98
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	353.400.000	290.454.000	62.946.000	82,19
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.780.000	23.345.000	1.435.000	94,21
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.944.000	13.605.000	1.339.000	91,04
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.944.000	13.605.000	1.339.000	91,04
39121	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	204.239.000	153.510.000	50.729.000	75,16
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.760.000	12.085.000	3.675.000	76,68
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15.760.000	12.085.000	3.675.000	76,68
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.479.000	141.425.000	47.054.000	75,03
2.08.07.2.01.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.659.000	131.325.000	40.334.000	76,50
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	16.820.000	10.100.000	6.720.000	60,05
37301	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	497.550.000	454.205.700	43.344.300	91,29
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	205.950.000	181.430.600	24.519.400	88,09
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	132.950.000	113.657.000	19.293.000	85,49
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	73.000.000	67.773.600	5.226.400	92,84
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	291.600.000	272.775.100	18.824.900	93,54

2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.600.000	75.600.000	0	100,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	197.175.100	18.824.900	91,28
37666	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.416.234.216	10.150.823.214	265.411.002	97,45
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.871.223.000	1.799.769.813	71.453.187	96,18
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.130.000	76.712.500	3.417.500	95,74
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	68.428.000	60.793.300	7.634.700	88,84
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	892.800.000	847.820.563	44.979.437	94,96
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.200.000	298.792.200	1.407.800	99,53
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	179.995.000	170.311.000	9.684.000	94,62
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	100.000.000	96.700.950	3.299.050	96,70
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	249.670.000	248.639.300	1.030.700	99,59
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6.293.885.500	6.112.094.551	181.790.949	97,11
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.066.177.000	1.058.782.000	7.395.000	99,31
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.901.108.500	2.730.706.351	170.402.149	94,13
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.547.325.000	1.546.024.900	1.300.100	99,92
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000	34.700.000	1.300.000	96,39
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37.347.000	37.347.000	0	100,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	703.800.716	692.933.950	10.866.766	98,46
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.720.000	109.055.150	8.664.850	92,64
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.348.000	5.347.800	200	100,00
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Teadu Kampung KB	75.330.716	73.129.000	2.201.716	97,08
5.1	BELANJA OPERASI	75.330.716	73.129.000	2.201.716	97,08
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	505.402.000	505.402.000	0	100,00

38031	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.375.658.500	5.338.144.000	37.514.500	99,30
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	430.158.500	392.644.000	37.514.500	91,28
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	38.460.000	30.333.000	8.127.000	78,87
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	288.610.000	11.390.000	96,20
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	43.763.500	34.635.000	9.128.500	79,14
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	47.935.000	39.066.000	8.869.000	81,50
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.945.500.000	4.945.500.000	0	100,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.590.500.000	2.590.500.000	0	100,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.355.000.000	2.355.000.000	0	100,00
JUMLAH		22.429.270.654	21.602.971.370	826.299.284	96,32

Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mendapatkan Anggaran sebesar :

Rp. 22.429.270.654 dari dana APBD dan DAK realisasinya anggaran sampai dengan semester II 2024 terserap sebanyak : Rp. 21.602.971.370 (96,32%), dengan rincian per sumber anggaran dibawah ini:

No	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1	DAU Reguler	7.947.084.736	7.440.000.000	93,62
2	DAU Khusus Pendidikan	458.171.702	422.585.299	92,23
3	DAU Khusus Kesehatan	315.330.716	304.464.000	96,55
4	BOKB / DAK Non Fisik	10.357.575.000	10.312.464.044	99,56
5	DAK FISIK	2.901.108.500	2.730.706.351	94,13
6	Dana Intensif Fiskal	500.000.000	441.857.600	88,37
JUMLAH		22.479.270.654	21.652.077.294	96,32

C Inovasi

Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 berikut:

1. Safari Pelayanan KB

- Safari dilaksanakan setiap bulan.
- Pelayanan berupa KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa IUD, Implan, Metode Operasi Pria (MOP), dan Metode Operasi Wanita (MOW).
- Pelayanan KB bekerja sama dengan 77 fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Praktek Mandiri Bidan.
- Pelayanan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, dan KB pasca persalinan.
- Pelayanan berupa pemasangan alat kontrasepsi, tes lab gula darah, dan tes lab kehamilan, diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya.
- Akseptor KB IUD dan Implan mendapatkan fasilitas uang transport, snack dan makan besar.
- Akseptor KB MOP dan MOW mendapatkan fasilitas uang transport Rp 100.000, snack dan makan besar, pengganti uang tidak bekerja untuk KB MOW Rp 450.000 dan KB MOP sebesar Rp. 900.000.
- Bagi akseptor KB yang mengalami kegagalan/komplikasi mendapatkan fasilitas pengayoman.

2. Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS)

- Gerakan gotong royong dari seluruh elemen dalam mempercepat penurunan stunting dengan memberikan intervensi langsung kepada keluarga yang mempunyai anak usia di bawah dua tahun (baduta) stunting.
- Dikuatkan dengan SE Bupati Kendal No. 440/2558/2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kendal.
- Intervensi berupa:
 - a. Pemberian makanan tambahan (PMT) tinggi protein senilai Rp 20.000 selama 90 hari, pengolahan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.
 - b. Pemberian 2 butir telur setiap hari selama 3 – 6 bulan, disalurkan melalui Tim Pendamping Keluarga.
 - c. Menyisihkan 1 porsi masakan rumahan lengkap siap saji sesuai gizi seimbang untuk satu baduta stunting selama 90 hari, disalurkan melalui Tim Pendamping Keluarga.
 - d. Memberikan bantuan sesuai kemampuan dan keikhlasan, untuk diolah menjadi makan siap saji tinggi protein oleh Tim Pendamping Keluarga.

3. Joko Ting-ting

- Joko Ting-Ting adalah Jogo Tonggo Kasus Stunting.
- Pendampingan pengasuhan tetangga secara bergantian terhadap anak dengan kasus stunting yang tidak bisa diasuh oleh orang tua/keluarga.
- Program Joko Ting-Ting juga mendampingi pengawasan pemberian PMT

dengan memastikan PMT terasup oleh sasaran.

- Pelaksanaan dilakukan secara kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi (IDI dan Persagi), dan Organisasi Masyarakat.

4. **Rekomendasi Pernikahan Dini melalui Puspaga**

- Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga yaitu bentuk layanan untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling bagi keluarga.
- Puspaga telah memberikan pelayanan berupa informasi, edukasi, dan konseling bagi anak beserta keluarga yang mengajukan pernikahan dini.
- Puspaga memberikan rekomendasi pernikahan dini sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi pernikahan dini.
- Rekomendasi didasarkan pada hasil konseling dan tes psikologis terhadap anak yang mengajukan pernikahan dini.

5. **Industri Rumahan**

- Industri Rumahan adalah industri skala rumah tangga yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
- Kegiatan berupa perintisan industri rumahan baru, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengolahan produk, pelatihan pengemasan, dan fasilitasi perizinan usaha.

6. **Layanan Cepat Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Via Whatsapp**

- Inovasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan dengan cepat, aman, dan mudah. Pengaduan bisa disampaikan setiap saat melalui *Whatsapp* dan direspon tidak lebih dari 1 x 24 jam.
- Nomor *Whatsapp* 0895 6367 82811.

D **Penghargaan**

Penghargaan yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal di Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Penghargaan - Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal di Tahun 2024

NO	JUDUL PRESTASI	OPD	KETERANGAN	PENGHARGAAN DARI
1	Kelompok KB Pria (Prio Utomo), Juara II	DP2KBP2PA	Juara II	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
2	Pencapaian Pelayanan KB dalam rangka Hari Ulang Tahun Muslimat NU Tk. Provinsi Jawa Tengah, Juara III	DP2KBP2PA	Juara III	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
3	Capaian Pelayanan KB dalam rangka Klinik Swasta Terbaik (Klinik Sylva Medika) Tk. Provinsi Jawa Tengah, Juara II	DP2KBP2PA	Juara III	BKKBN Provinsi Jawa Tengah

NO	JUDUL PRESTASI	OPD	KETERANGAN	PENGHARGAAN DARI
4	Kabupaten dengan Penambahan Rumah Dataku Paripurna Terbanyak Tahun 2024	DP2KBP2PA	Juara I	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
5	Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tahun 2024	SMA N 1 Boja	Juara 2 Nasional	BKKBN RI
6	Gen-Reaksi (Genre Berani, Beraksi dan Berkolaborasi),	Forgen Kab. Kendal	Juara Terkreatif	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
7	Apresiasi Duta Generasi Berencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Forgen Kab. Kendal	Top 10 Duta Genre Jawa Tengah Putri 2024	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
8	Apresiasi Duta Generasi Berencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Forgen Kab. Kendal	Juara <i>Influencer</i> Duta Genre Jawa Tengah Putri 2024	BKKBN Provinsi Jawa Tengah

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Kendal merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena beberapa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dan beberapa target belum dapat dicapai, harapan kami di tahun-tahun selanjutnya seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

B REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Sosialisasi program kepada semua penyuluh KB dan stakeholders;
2. Pembentukan dan pembaharuan Surat Keputusan (SK) Forum Anak dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
3. Peningkatan kapasitas kepada stakeholder terkait dalam penanganan isu-isu di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Penyusunan strategi daerah dalam perwujudan ketahanan keluarga yang melibatkan lintas sektor dan jejaring PUG;
5. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);
6. Pembinaan rutin dan koordinasi Petugas Lapangan dan pegawai dilingkungan DP2KBP2PA;
7. Mengoptimalkan kerja sama mitra terkait;
8. Koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait, Tingkat Kabupaten/Provinsi dan Pusat;
9. Permohonan alat kontrasepsi ke pusat sesuai kebutuhan masyarakat;
10. Pemberian layanan kesehatan reproduksi dan penggantian retribusi layanan pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan melalui Puskesmas / KKB;

11. Memberikan Penghargaan pada Akseptor MOP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan trimakasih.

Kendal, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal



ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19810522 200501 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik, dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Kendal, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal



ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19810522.200501 1 010

11. Memberikan Penghargaan pada Akseptor MOP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan trimakasih.

Kendal, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810522 200501 1 010

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B. Sc
Jabatan : BUPATI KENDAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

DICO M GANINDUTO, B.Sc

PIHAK PERTAMA,

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA	1. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,2
2.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %
3.	Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dalam Konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20/100.000 penduduk perempuan
4.	Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern Bagi PUS	4. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	70 %
5.	Peningkatan Layanan Kesertaan Ber-KB bagi PUS	5. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,2
		6. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	12 %

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.608.841.236	DAU
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	399.991.702	DAU dan DAU Khusus Pendidikan
3.	Program Perlindungan Perempuan	167.836.000	DAU, Fiskal, dan DAU Khusus Kesehatan
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	76.625.000	DAU dan DAU Khusus Pendidikan
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	180.000.000	Fiskal
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	312.724.000	DAU, Fiskal, dan DAU Khusus

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
			Khusus Pendidikan
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	204.239.000	DAU
8.	Program Pengendalian Penduduk	414.600.000	DAU, DAK, dan DAU Khusus Pendidikan
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.415.052.716	DAU, DAK dan DAU Khusus Kesehatan
10.	Program Pemberdayan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.342.779.500	DAU dan DAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Pagu Anggaran Rp 23.122.689.154

Kendal, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



DICO M. GANINDUTO, B.Sc

PIHAK PERTAMA,



ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KENDAL
KEPALA DINAS

[illegible]

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRA M	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET			
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
		I	II	III	IV							1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
	Presentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	12,27	12,21	12,15 %	12%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina	70%	Merencanakan sosialisasi tribina agar disetiap desa / kelurahan terbentuk tiga tribina	5.342.779.500	DP2KBP2PA																

Kendal, 25 Januari 2024

Kepala DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal



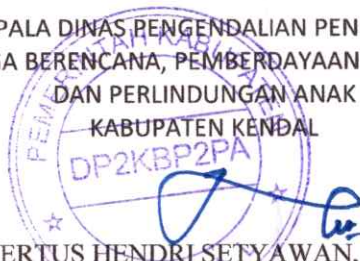
ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, SP, MT
NIP. 19810522 200501 1 010

KABUPATEN KENDAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jenis : RKT
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,2
2	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dalam Konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20/100.000 penduduk perempuan
4	Meningkatnya Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern bagi PUS	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	70%
5	Peningkatan Layanan Kesertaan ber KB bagi PUS	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,2
		Presentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	12%

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL


ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P, M.T
NIP.19810522 200501 1 010